

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Manajemen

1. Definisi Manajemen

Pengertian ilmu manajemen sangat beragam dan tergantung dari sudut pandang, keyakinan dan komprehensi pakar manajemen. Pakar Pendidikan AT Sugito, memberikan definisi bahwa Manajemen adalah tindakan memikirkan dan mencapai hasil-hasil yang diinginkan melalui usaha kelompok yang terdiri-dari tindakan mendayagunakan bakat-bakat manusia dan sumber-sumber daya. Manajemen tidak lain adalah usaha melaksanakan hal-hal tertentu melalui manusia dengan merencanakan dan mengimplementasikannya, ini berarti bahwa manajemen adalah pemuasan kebutuhan – kebutuhan ekonomi dan sosial karena sifat produktif manusia bagi manusia, perekonomian dan masyarakat¹. Senada dengan pendapat tersebut Muwahid Shulhan dan Soim memberikan pengertian, manajemen adalah suatu proses dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan manajemen sebagai ilmu dan seni mengatur proses pendayagunaan sumber daya manusia dan lainnya secara efisien, efektif dan produktif dalam mencapai suatu tujuan². Bersesuaian dengan Muwahid Shulhan dan Soim, Husaini Usman memberikan pengertian lebih detail, manajemen dalam arti sempit adalah manajemen sekolah/madrasah, yang meliputi, perencanaan program sekolah/madrasah,

¹ Sugito, AT, *Pergeseran Paradigmatik Manajemen Pendidikan*, Widya Karya, Semarang, 2013, hlm. 21

²Shulhan Muwahid, dan Soim, *Manajemen Pendidikan Islam*, Teras, Bandung, 2013, hlm. 7.

kepemimpinan kepala sekolah/madrasah, pengawasan, dan sistem informasi sekolah/madrasah, pala sekolah/madrasah.³

Nanang Fattah, mengemukakan bahwa manajemen adalah proses merencana, mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.⁴ Fungsi perencanaan antara lain menentukan tujuan atau kerangka tindakan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan dengan mengkaji kekuatan dan kelemahan organisasi, menentukan kesempatan dan ancaman, menentukan strategi, kebijakan dan program yang dilakukan berdasarkan proses pengambilan keputusan secara ilmiah. Fungsi pengorganisasian meliputi penentuan fungsi, hubungan (tanggung jawab dan wewenang) struktur (horisontal dan vertikal), semuanya itu memperlancar alokasi sumber daya dengan kombinasi yang tepat untuk mengimplementasikan rencana. Fungsi pemimpin menggambarkan bagaimana manajer mengarahkan dan mempengaruhi para bawahan. Fungsi pengawasan meliputi penentuan standar, supervisi dan mengukur pelaksanaan terhadap standar dan memberikan keyakinan bahwa tujuan organisasi tercapai. Pengawasan saling terkait dengan perencanaan, karena melalui pengawasan efektifitas manajemen dapat diukur.⁵

Manajemen menurut Islam adalah aktifitas yang berlandaskan nilai-nilai keadilan yang merupakan perbuatan pimpinan yang tidak menyakiti atau menzalimi bawahan⁶. Jadi manajemen adalah tindakan untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya manusia melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan berlandaskan nilai-nilai keadilan. Dalam pandangan

³Usman, Husaini, *Manajemen, Teori, Praktik,, dan Riset Pendidikan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hlm.6.

⁴ Fattah, Nanang, *Landasan Manajemen Pendidikan* PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 2013, hlm .1.

⁵ Ibid, hlm.2.

⁶ Seafullah, U, KH, *Manajemen Pendidikan Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm.49.

Islam, segala sesuatu harus dilakukan dengan secara tertib, sah, rapi dan teratur mulai dari urusan sederhana hingga yang kompleks, semua itu diperlukan pengaturan yang baik dan terarah dalam sebuah manajemen agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih secara efisien dan efektif.

2. Prinsip-Prinsip Manajemen

Dalam manajemen terdapat prinsip-prinsip yang harus dijalankan agar pengelolaan aktifitas manajerial dapat berjalan sukses. Prinsip-prinsip umum manajemen seperti pandangan Henry Fayol adalah

- a. Asas pembagian kerja
- b. Asas Wewenang dan tanggungjawab
- c. Asas disiplin
- d. Asas kesatuan perintah
- e. Asas kesatuan jurusan atau arah
- f. Asas kepentingan umum di atas kepentingan pribadi
- g. Asas pembagian gaji yang wajar
- h. Asas pemusatan wewenang
- i. Asas hierarki atau asas rantai berkala
- j. Asas keteraturan
- k. Asas keadilan
- l. Asas inisiatif
- m. Asas kesatuan
- n. Asas kestabilan masa jabatan.⁷

Dalam manajemen pendidikan Islam terdapat beberapa prinsip yang membedakan dengan manajemen pendidikan pada umumnya. Menurut Ali Mufron prinsip-prinsip manajemen dapat diuraikan sebagai berikut

- a. Ikhlas

Ikhlas adalah membersihkan perbuatan dari perbuatan makhluk. Segala aktifitas yang dilakukan manusia hendaknya dijadikan sebagai ibadah

⁷ Ibid, hlm.11.

kepada Allah Swt. Pengabdian yang bernilai tinggi adalah yang disertai dengan keikhlasan hati karena Allah Swt.

b. Kejujuran

Sikap manajer dalam pendidikan Islam selalu menunjang kebenaran dan kejujuran. Kebenaran dan kejujuran akan membawa manusia mampu mencapai pada derajat ketaqwaan yang merupakan taraf tertinggi bagi orang beriman.

c. Amanah

Dalam prosesnya manajemen dalam pendidikan harus mempunyai prinsip amanat. Sebab tanpa amanat para pengelola akan bekerja dengan ragu-ragu dan serba salah, jika mereka diberi kepercayaan penuh, mereka akan mengarahkan seluruh potensi yang ada pada diri mereka demi kemajuan pendidikan Islam.

d. Adil

Keadilan terjadi berdasarkan keputusan akal yang dikonsultasikan dengan agama. Adil adalah sikap moderat, objektif terhadap orang lain atau persamaan dan keseimbangan dalam memberikan hak orang lain, tanpa ada yang dlebihkan atau dikurangi

Semua keputusan yang diambil dalam manajemen pendidikan Islam harus mencerminkan sikap adil, baik dalam menimbang, menyampaikan, maupun dalam melaksanakan.

e. Tanggungjawab

Semua tindakan yang dilakukan oleh seorang manajer akan dimintai pertanggungjawaban. Demikian juga segala aktifitas dan kebijaksanaan yang diambil oleh pengelola pendidikan Islam harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban bukan hanya dihadapan manusia dan masyarakat, tetapi juga dihadapan Allah swt.

f. Dinamis

Sistem manajemen pendidikan Islam seharusnya merupakan sebuah sistem yang dinamis. Dinamika tersebut selalu diarahkan kepada

tujuan pendidikan Islam dan dilandasi dengan prinsip-prinsip manajemen.

g. Praktis

Teori manajemen dalam pendidikan Islam harus dapat diaplikasikan. Pengaplikasian ini pada dasarnya merupakan implementasi keimanan seorang muslim dalam bentuk amal saleh.

h. Fleksibel

Sistem manajemen dalam pendidikan Islam diharapkan mampu memberi warna bahkan mengarahkan sistem manajemen pendidikan lain ke arah yang lebih bermanfaat. Dengan prinsip di atas, sistem manajemen pendidikan Islam mampu memberikan kontribusi besar. Sistem manajemen tersebut mampu memberikan arahan positif bagi perkembangan dunia manajemen. Arahan yang positif dimulai dari tatanan konsep, teoritis dan tatanan praktis. Arahan ini dimaksudkan agar sistem manajemen kontemporer dewasa ini bergeser menjadi sistem manajemen yang integral dan bulat.

3. Fungsi Manajemen

Para pakar manajemen menjelaskan fungsi-fungsi manajemen secara garis besar dapat dipahami bahwa seluruh kegiatan manajemen tidak dapat terlepas dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Penjelasan mengenai fungsi manajemen adalah sebagai berikut

a. Planning/Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan serangkaian keputusan untuk mengambil tindakan di masa yang akan datang yang diarahkan kepada tercapainya tujuan-tujuan dengan sarana yang optimal⁸. Lebih detail U. Saefullah mengatakan Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi perencanaan adalah proses mempersiapkan

⁸Mufron, Ali, *Ilmu Pendidikan Islam*, Aura Pustaka, 2013, hlm.155.

serangkaian keputusan untuk mengambil tindakan di masa mendatang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan merupakan penetapan jawaban kepada enam pertanyaan berikut.

- 1) Apa tindakan yang harus dikerjakan ?
- 2) Mengapa tindakan itu harus dikerjakan ?
- 3) Di mana tindakan itu harus dikerjakan ?
- 4) Kapan tindakan itu harus dikerjakan ?
- 5) Siapa yang akan mengerjakan tindakan itu
- 6) Bagaimana cara melaksanakan tindakan itu ?.⁹

Fungsi perencanaan (*planning*) antara lain untuk menentukan tujuan atau kerangka tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Penetapan tujuan ini mengacu pada visi dan misi yang telah ditentukan sebelumnya. Perencanaan dalam pembiayaan pendidikan Islam bukan hanya diarahkan kepada kesempatan dan pencapaian kepada kesempurnaan dan pencapaian kebahagiaan di dunia saja, tetapi diarahkan pada kesempurnaan ukhrowi secara seimbang. Perencanaan (*planning*) adalah sifat sesuatu rencana yang baik, sesuatu rencana yang baik mengandung sifat-sifat sebagai berikut

- 1) Pemakaian kata-kata yang sederhana dan terang

Kata-kata dan kalimat yang dipergunakan oleh suatu rencana haruslah sederhana dan mudah dimengerti agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda, karena pembuat rencana tidak selalu orang yang melaksanakan rencana.

- 2) Fleksibel

Rencana yang di buat dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang tidak diduga sebelumnya, artinya rencana tidak perlu diubah seluruhnya kalau terjadi perubahan , melainkan hanya perubahan sedikit yang dimungkinkan oleh rencana sebelumnya.

- 3) Mempunyai stabilitas dan ada dalam pertimbangan

⁹ Saefullah, U,KH, Op.Cit, hlm. 22.

Rencana mempunyai sifat stabil yang tidak perlu setiap kali ubah atau tidak dipakai sama sekali, jadi suatu rencana harus ada dalam pertimbangan.

4) Meliputi semua tindakan yang diperlukan

Rencana meliputi segala-galanya sehingga terjamin koordinasi dari tindakan-tindakan seluruh unsur-unsur organisasi.¹⁰

a) Model –Model Perencanaan

(1) Model Perencanaan Komprehensif

Model ini digunakan untuk menganalisis perubahan-perubahan dalam perencanaan pembiayaan pendidikan secara keseluruhan, dan berfungsi sebagai patokan dalam menjabarkan rencana yang lebih spesifik ke arah tujuan yang luas.

(2) Model Target Setting

Model ini diperlukan untuk melaksanakan proyeksi atau memperkirakan tingkat perkembangan dalam kurun waktu tertentu

(3) Model Costing (Pembiayaan) dan Keefektifan Biaya

Model ini digunakan untuk menganalisis proyek dalam kriteria efisien dan efektifitas ekonomis . Dengan model ini dapat diketahui proyek yang fisibel dan memberikan perbandingan yang paling baik diantara proyek-proyek yang menjadi alternatif penanggulangan masalah yang di hadapi. Model ini dijadikan dasar pada pertimbangan bahwa pendidikan tidak lepas dari masalah pembiayaan. Dengan sejumlah biaya yang dikeluarkan selama proses pendidikan diharapkan dalam kurun waktu tertentu dapat memberikan *benefit* tertentu.

(4) Model PPBS

¹⁰ Mufron, Ali, Op.Cit, hlm.158.

PPBS (*planning, programing, budgeting,system*) adalah sistem perencanaan , penyusunan program dan penganggaran (SP4). Artinya bahwa perencanaan ,penyusunan program, dan penganggaran dipandang sebagai suatu sistem yang tak terpisahkan satu sama lainnya. PPBS merupakan pendekatan sistematis yang berusaha menetapkan tujuan, mengembangkan program, untuk dicapai, menemukan besarnya biaya dan alternatif menggunakan proses penganggaran yang merefleksikan kegiatan program jangka panjang.¹¹

b) Metode-Metode Perencanaan

(1) Metode *Mean –ways and analysis* (analisis mengenai alat-cara-tujuan)

Metode ini digunakan untuk meneliti sumber-sumber dan alternatif untuk mencapai tujuan tertentu, yang dianalisis adalah, means yang berkaitan dengan sumber yang diperlukan, ways yang berhubungan dengan cara dan alternatif tindakan yang dirumuskan dan bakal dipili, ends berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai.

(2) Metode *input-output analysis* (analisis masukan dan keluaran)

Metode ini dilakukan dengan pengkajian terhadap interelasi interdependensi berbagai komponen masukan dan keluaran dari suatu sistem.

(3) Metode *econometric analysis* (analisis ekonometrik)

Metode ini mengembangkan persamaan-persamaan yang menggambarkan ketergantungan diantara variabel-variabel yang ada dalam suatu sistem

(4) Metode *Delphi*

¹¹FattahNanang ,*LandasanManajemenPendidikan*, PT Remaja RosdaKarya,2013, hlm.50-51.

Metode ini bertujuan untuk menentukan sejumlah alternatif program, mengeksplorasi asumsi-asumsi atau fakta yang melandasi. Partisipan dalam metode ini adalah orang yang dianggap ahli dalam disiplin ilmu tertentu.

(5) Metode Heuristik

Metode ini dirancang untuk mengeksplorasi isu-isu dan mengakomodasi pandangan yang bertentangan atau ketidakpastian, yang didasarkan pada prinsip dan prosedur yang mensistematiskan langkah-langkah dalam usaha pemecahan masalah.

(6) Metode analisis siklus kehidupan (*life –cycle analysis*)

Metode ini digunakan untuk mengalokasikan sumber-sumber dengan memperhatikan siklus kehidupan mengenai produksi, proyek program, atau aktifitas. Langkah –langkah yang ditempuh adalah fase konseptualisasi, spesifikasi, pengembangan prototif, pengujian dan evaluasi, operasi, dan produksi. Metode ini digunakan dalam bidang pendidikan terutama dalam mengalokasikan sumber-sumber pendidikan dengan melihat kecenderungan dari berbagai aspek yang dapat dipertimbangkan untuk merumuskan rencana program.

(7) Metode *value added analysis* (analisis nilai tambah)

Metode ini untuk mengukur keberhasilan peningkatan produksi atau pelayanan, dengan demikian akan didapatkan gambaran singkat tentang aspek tertentu terhadap aspek lainnya.¹²

b. Organizing/Pengaturan

Organizing (*organisasi*) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran. Mengorganisasikan adalah suatu proses

¹²Ibid, hlm. 53.

menghubungkan orang-orang yang terlibat dalam organisasi tertentu dan menyatupadukan tugas serta fungsinya dalam organisasi.¹³ Organisasi dapat juga diartikan sebagai alat untuk mempersatukan usaha-usaha dalam rangka menyelesaikan pekerjaan.

Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan menyusun semua sumber yang disyaratkan dalam rencana, terutama sumber daya manusia, sedemikian rupa sehingga kegiatan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.¹⁴ Jadi pengorganisasian adalah kerjasama terstruktur untuk mencapai sasaran untuk mempersatukan usaha-usaha dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Dalam proses pengorganisasian dilakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara terperinci berdasarkan bagian dan bidang masing-masing sehingga terintegrasikan hubungan-hubungan kerja yang sinergis, kooperatif, harmonis dan seirama dalam mencapai tujuan yang telah disepakati. Dalam pengorganisasian dilakukan hal-hal sebagai berikut

- 1) Penerimaan fasilitas, perlengkapan yang diperlukan untuk melaksanakan rencana
- 2) Pengelompokan dan pembagian kerja menjadi struktur organisasi yang teratur
- 3) Pembentukan struktur kewenangan dan mekanisme koordinasi
- 4) Penentuan metode kerja dan prosedurnya
- 5) Pemilihan, pelatihan, dan pemberian informasi.

Organisasi yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut

- 1) Memiliki tujuan yang jelas
- 2) Tiap anggota dapat memahami dan menerima tujuan tersebut
- 3) Adanya kesatuan arah sehingga dapat menimbulkan kesatuan tindakan dan kesatuan pikiran
- 4) Adanya kesatuan perintah

¹³ Saefullah, U, KH, Op.Cit, hlm. 22.

¹⁴ Mufron Ali, Op.Cit, hlm.158.

- 5) Adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab
- 6) Adanya pembagian tugas yang sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan masing-masing adanya jaminan keamanan dalam bekerja dan insentif yang setimpal.¹⁵

c. Aktuating/Pelaksanaan/Pergerakan

Aktuating adalah kegiatan yang menggerakkan dan mengusahakan agar para pekerja/pelaksana melakukan tugas dan kewajibannya.¹⁶ Senada dengan hal tersebut, Ali Mufron mengemukakan aktuating adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pimpinan untuk memberikan penjelasan, petunjuk serta bimbingan kepada orang-orang yang menjadi bawahannya sebelum dan selama melaksanakan tugas.¹⁷ Jadi aktuating adalah kemampuan pimpinan untuk menggerakkan dan mengusahakan pekerja dengan memberikan bimbingan dan petunjuk untuk melaksanakan tugasnya sebelum dan selama melaksanakan tugas. Dalam aktuating terdapat hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penetapan start pelaksanaan rencana kerja
- 2) Pemberian contoh tata cara pelaksanaan kerja dari pimpinan
- 3) Pemberian motivasi para pekerja untuk segera bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing
- 4) Pengkomunikasian seluruh pekerjaan dengan semua unit kerja
- 5) Pembinaan pra pekerja
- 6) Peningkatan mutu dan kualitas kerja
- 7) Pengawasan kinerja dan moralitas pekerja.¹⁸

d. Pengawasan (*Controlling*)

Controlling atau pengawasan adalah kegiatan menilai dan koreksi terhadap segala hal yang telah dilakukan oleh bawahan sehingga dapat diarahkan ke jalan yang benar sesuai dengan tujuan.

¹⁵ Saefullah, U, KH, Op.Cit, hlm. 42.

¹⁶ Saefullah, U, KH, Ibid, hlm.42

¹⁷ Mufron, Ali, Op.Cit, hlm.159.

¹⁸ Saefullah, U, KH, Op.Cit, hlm. 42.

Dalam Pendidikan Islam pengawasan adalah proses pemantauan yang terus menerus untuk menjamin terlaksananya perencanaan secara konsekuen, baik materiil maupun spiritual, untuk meluruskan sesuatu yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak¹⁹. Senada dengan pengertian tersebut, Ali Mufron mendefinisikan bahwa pengawasan adalah mengukur pelaksanaan dengan tujuan menentukan sebab-sebab penyimpangan dan mengambil tindakan korektif dimana perlu.²⁰ Hal serupa dikemukakan Murdick dalam Nanang Fattah, pengawasan adalah proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan bagaimanapun rumit, dan luasnya suatu organisasi, proses dasar tersebut adalah, menetapkan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan kerja, dan menentukan kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar dan rencana.²¹ Jadi controlling adalah proses pemantauan untuk mengukur pelaksanaan rencana yang bertujuan untuk mencegah penyimpangan. Pengawasan dalam konsep Islam lebih menggunakan pendekatan manusiawi yang dijiwai nilai-nilai keislaman dengan prosedur/langkah-langkah :

- 1) Memeriksa
- 2) Mengecek
- 3) Mencocokkan
- 4) Menginspeksi
- 5) Mengendalikan
- 6) Mengatur dan
- 7) Mencegah sebelum terjadi kegagalan.

H.AT.Soegito, mempertajam bahwa pengawasan meliputi penentuan standar ,supervisi, dan mengukur penampilan/pelaksanaan

¹⁹Saefullah, U, KH, Ibid, hlm.38.

²⁰Mufron, Ali, Op.Cit, hlm. 160.

²¹ Fattah, Nanang, Op.Cit, hlm.101.

terhadap standar dan memberikan keyakinan bahwa tujuan organisasi tercapai.²²

Kontrol mempunyai peranan yang penting dalam manajemen, Adapun maksud dan tujuan pengawasan dan pengendalian adalah :

- 1) Untuk mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak
- 2) Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kesalahan yang sama.
- 3) Untuk mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
- 4) Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pembiayaan sesuai dengan program yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.
- 5) Untuk mengetahui hasil pekerjaan dengan membandingkan yang telah ditetapkan dalam planning
- 6) Untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan prosedur dan kebijaksanaan yang telah ditentukan.

Dalam proses pengawasan terdapat beberapa unsur yang perlu mendapat perhatian , yaitu:

- 1) Unsur proses, yaitu usaha yang bersifat kontinu terhadap suatu tindakan yang dimiliki dari pelaksanaan suatu rencana sampai hasil akhir yang diharapkan
- 2) Unsur adanya objek pengawasan/sasaran pengawasan baik penerimaan maupun pengawasan
- 3) Ukuran atau standarisasi dari pengawasan
- 4) Teknik-teknik pengawasan.

Dalam kebijakan kepengawasan Departemen Pendidikan dan kebudayaan , dinyatakan bahwa sistem pengawasan harus berorientasi pada hal-hal berikut :

- 1) Kehematan
- 2) Menindak lanjuti hasil temuan

²²Soegito, H.A.T, *PergeseranParadigmatikManajemenPendidikan*, WidyaKarya, Semarang, 2008, hlm.34.

- 3) Diarahkan pada bidang strategis dengan memperhatikan aspek manajemen
- 4) Dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi teknis, sikap dedikasi ,integrasi, dan pribadi yang baik
- 5) Akurat
- 6) Tepat waktu
- 7) Objektif dan komprehensif
- 8) Tidak mengakibatkan pemborosan
- 9) Kegiatan pengawasan mampu mengoreksi dan menilai pelaksanaan pekerjaan.²³

4. Implementasi Manajemen

a. Perencanaan

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu secara efisien dan efektif.²⁴ Perencanaan adalah kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan dengan kegiatan yang ditetapkan sebelumnya , adanya proses, hasil yang ingin dicapai, dan menyangkut masa depan dalam waktu tertentu .²⁵ Perencanaan merupakan tindakan menetapkan sesuatu yang akan dikerjakan , bagaimana mengerjakannya, apa yang harus dikerjakan dan siapa yang mengerjakannya. Perencanaan merupakan jembatan yang menghubungkan kesenjangan antara keadaan masa kini dan mendatang. Jadi perencanaan dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan adalah keputusan yang diambil untuk melakukan tindakan selama waktu tertentu agar penyelenggaraan pengelolaan pembiayaan pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien ,

²³Nanang, Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012, hlm.65-66.

²⁴ Fattah, Nanang, *Landasan Manajemen Pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, hlm.49.

²⁵Usman,Husaini, *Manajemen, Teori,Praktik, dan Riset Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hlm. 77.

agar semua kebutuhan madrasah/sekolah dapat terpenuhi sehingga kelak menghasilkan lulusan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan. Hal terpenting dalam menyusun rencana anggaran pendapatan belanja madrasah (RAPBM) adalah memanfaatkan dan mengalokasikan dana secara tepat menurut kebutuhan yang diperlukan madrasah. Ada empat langkah dasar dalam perencanaan pembiayaan pendidikan, yaitu :

Pertama menetapkan tujuan, artinya perencanaan dimulai dengan keputusan untuk menetapkan sebuah tujuan, tanpa tujuan yang jelas sebuah madrasah akan menggunakan daya secara tidak efektif.

Kedua merumuskan keadaan saat ini, pemahaman kondisi sekarang dari tujuan yang hendak dicapai sangat penting , karena tujuan dan rencana menyangkut waktu akan datang.

Ketiga mengidentifikasi segala kemudahan, kekuatan, kelemahan serta hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan dalam mencapai tujuan.

Keempat mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tahap akhir dalam proses perencanaan yang meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan.²⁶

Perencanaan membutuhkan data dan informasi agar keputusan yang diambil tidak lepas kaitannya dengan masalah yang dihadapi pada masa mendatang. Model perencanaan di MTs Maslakul Huda Sluke menggunakan model Costing (pembiayaan) berdasarkan keefektifan biaya. Model ini digunakan untuk menganalisis kebutuhan di madrasah dalam kriteria efisien , efektif dan efektifitas ekonomis. Model ini dapat mengetahui kegiatan/ proyek yang fleksibel dan memberikan suatu perbandingan yang paling baik diantara proyek yang menjadi alternatif penanggulangan masalah yang dihadapi. Penggunaan model ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pendidikan tidak lepas dari

²⁶Luneto, Buhari, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Madrasah*, Tadbir, Vol.3, No 2,2015,IAIN Sultan amai Gorontalo, hlm. 23-24.

pembiayaan yang dalam waktu tertentu akan menghasilkan keuntungan.

b. Pengorganisasian/Organizing

Pengorganisasian sebagai proses membagi kerja kedalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebaskan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya, dan mengalokasikan sumber daya, serta mengkoordinasikannya dalam kerangka efektifitas pencapaian tujuan organisasi.²⁷ Proses pengorganisasian dalam menyusun RAPBM/S diawali dengan pemerincian pekerjaan, pembagian kerja, penyatuan pekerjaan, koordinasi pekerjaan, dan monitoring.

c. Pengaktualisasian/pelaksanaan/aktuating

Pada proses ini perencanaan pendidikan tinggal mengatur bagaimana menjalankan /menggerakkan perencanaan pembiayaan pendidikan yang telah diperinci kedalam pengorganisasian anggaran pendidikan, dengan berpedoman bahwa penggunaan anggaran pendidikan sesuai apa yang telah ditetapkan dalam RAPBM/S. Dalam hal ini pelaksana adalah bendahara madrasah yang harus mencatat keluar masuknya pergerakan pembiayaan pendidikan.

d. Pengawasan/Kontroling

Pengawasan adalah aktivitas menilai, baik catatan (record) dan menentukan prosedur-prosedur dalam mengimplementasikan anggaran, apakah sesuai dengan peraturan, kebijakan, dan standar-standar yang berlaku²⁸. Tujuan dari pengawasan adalah mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya, artinya pengawasan pembiayaan pendidikan diharapkan dapat mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi dari penggunaan sumber-sumber dana yang tersedia dan membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai syarat-syarat sistem. Proses pengawasan terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu :

²⁷ Fattah, Nanang, Op.cit, hlm.71.

²⁸Fattah ,Nanang, *EkonomidanPembiayaanPendidikan*,PT Remaja RosdaKarya, Bandung, 2000.hlm .65.

memantau (monitoring), menilai, dan melaporkan hasil-hasil temuan kegiatan atau monitoring dilakukan terhadap kinerja aktual baik dalam proses maupun hasilnya, aktivitas yang sedang dan telah dilakukan terhadap kinerja aktual baik dalam proses maupun hasilnya berdasarkan kriteria yang di gariskan. Dalam proses pengawasan terdapat beberapa unsur yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

- a. Unsur proses, yaitu usaha yang bersifat kontinu terhadap suatu tindakan yang dimiliki dari pelaksanaan suatu rencana sampai dengan hasil akhir yang diharapkan.
- b. Unsur adanya objek pengawasan, yaitu sesuatu yang menjadi sasaran pengawasan, baik penerimaan atau pengeluaran.
- c. Ukuran dan standarisasi dari pengawasan
- d. Teknik-teknik pengawasan.

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses pengawasan pembiayaan pendidikan adalah

- a. Penetapan standar yang dipergunakan berupa kuantitas, kualitas, biaya dan waktu.
- b. Mengukur dan membandingkan antara kenyataan dan sebenarnya dengan standar yang telah ditetapkan.
- c. Mengidentifikasi penyimpangan (deviasi).
- d. Menentukan tindakan perbaikan atau koreksi yang kemudian menjadi materi rekomendasi.²⁹

Secara khusus, pemeriksaan terhadap anggaran pengeluaran pembiayaan pendidikan dapat dilakukan dengan format seperti tabel berikut.³⁰ :

²⁹ Fattah, Nanang, Ibid, hlm.67

³⁰ Akdon, et, al, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 2015, hlm.54

NO	Komponen Penge luaran	Pengeluaran Yang Dianggarkan		Realisasi Penge luaran		Kebutu han Biaya		Keku rangan Biaya		Kele bihan Biaya	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
		1	Gaji								
2	Sarana Belajar										
3	Alat Belajar										
4	Buku Belajar										
5	Pemeliharaan gedung										
6	Kegiatan Kesiswaan,d st										
	Total										

B. Pendidikan Islam(Madrasah)

1. Konsep Pendidikan Islam di Madrasah

Pendidikan Islam adalah upaya mengembangkan, mendorong serta mengajak manusia untuk lebih maju dengan berlandaskan nilai-nilai tinggi dan kehidupan yang mulia, sehingga terbentuk pribadi yang lebih sempurna baik akal, perasaan maupun perbuatan.³¹ Arifudin Arif menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam dalam usaha membina dan membentuk pribadi muslim yang bertaqwa kepada Allah Swt.³² Jadi pendidikan Islam adalah upaya mengembangkan kepribadian manusia berdasarkan ajaran Islam dengan bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani melalui bimbingan, pengarahan, pengajaran, pelatihan, pengasuhan dan pengawasan. Untuk

³¹ Mujib, Abdul dan Jusuf Mudzakir, *Ilmu Pendidikan Islam*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.26.

³² Arif, Arifudin, *Pengantar Ilmu Pendidikan Islam*, Kultura, Jakarta, 2008, hlm.57.

mencapai keberhasilan pendidikan Islam diperlukan penataan atau manajemen.

Manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses penataan atau pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang melibatkan sumber daya manusia muslim dan menggerakkannya untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien.³³ Menurut Mujamil Qomar, manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara islami dengan cara menyiasati-sumber-sumber belajar dan hal-hal lain yang terkait untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien.³⁴ Manajemen pendidikan Islam lebih bersifat khusus dan mengarah pada manajemen yang diterapkan dalam pengembangan pendidikan Islam dalam hal ini adalah salah satunya adalah madrasah. Madrasah berasal dari kata dirosah, merupakan terjemahan dari sekolah dalam bahasa arab. Selama ini madrasah dianggap sebagai lembaga pendidikan Islam yang mutunya lebih rendah daripada sekolah. Ada banyak faktor yang menyebabkan mutu madrasah lemah, termasuk masalah yang berhubungan dengan beban yang harus dijalani siswa. Siswa di madrasah wajib mempelajari semua mata pelajaran siswa di sekolah umum, plus rumpun agama yang meliputi bahasa arab, Al qur`an - Hadist, akidah-akhlaq, fikih-ushul al fiqih, dan sejarah kebudayaan Islam. Pada sisi lain disadari bahwa potensi siswa madrasah rata-rata merupakan kelas menengah ke bawah. Secara intelektual kemampuan mereka berbeda, secara ekonomi, posisi mereka berada pada strata sosial kelas menengah ke bawah. Selanjutnya, guru-guru di madrasah masih banyak yang kurang profesional, baik dalam tingkat pendidikan maupun keahliannya. Demikian juga dengan sarana dan prasarannya, perpustakaan serta laboratorium yang sekiranya menjadi jantung madrasah ternyata tidak memadai³⁵. Hal inilah yang akan menjadi garapan penelitian ini bagaimana menata manajemen madrasah agar mempunyai daya saing

³³ Uhbiyati, Nur, *Ilmu Pendidikan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 1998, hlm.19.

³⁴ Qomar, Mujamil, *Manajemen Pendidikan Islam*, Airlangga, Jakarta, 2007, hlm.10.

³⁵ Ibid, hlm.85.

dan berkelanjutan. Dalam pandangan Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur, proses-prosesnya harus diikuti dengan baik dan tidak boleh dilakukan asal-asalan, semua itu diperlukan pengaturan yang baik, tepat dan terarah dalam bingkai sebuah manajemen agar tujuan yang hendak dicapai bisa diraih dan bisa selesai secara efisien dan efektif.³⁶ Pada era sekarang madrasah dikelola secara profesional dengan manajemen modern yang berorientasi pada kemajuan dan peningkatan mutu dalam segala bidang, baik prestasi maupun keunggulan madrasah yang dikelola.

2. Unsur-Unsur Pendidikan Islam

Dalam implementasi fungsi pendidikan Islam sangat memperhatikan unsur yang turut mendukung terhadap pendidikan Islam. Menurut Kamrani Buseri, sekurang-kurangnya ada enam hal unsur-unsur pendidikan islam yaitu

a. Tujuan pendidikan

Pendidikan seharusnya bertujuan mencapai pertumbuhan yang seimbang dalam kepribadian manusia secara total melalui pelatihan spiritual, kecerdasan, rasio, perasaan dan panca indera. Tujuan pendidikan Islam adalah mencetak manusia yang berbudi pekerti luhur supaya menjadi manusia yang sempurna guna menghambakan diri kepada Allah swt.

b. Pendidik

Pendidik adalah orang yang bertanggungjawab terhadap upaya perkembangan jasmanai dan rohani peserta didik agar mencapai tingkat kedewasaan sehingga ia mampu menunaikan tugas-tugas kemanusiaannya sesuai nilai ajaran Islam. Guru adalah jabatan profesional yang memerlukan berbagai keahlian khusus, yaitu kepribadian, pengetahuan, dan keterampilan.

³⁶Ibid , hlm .9.

c. Peserta didik

Peserta didik atau objek pendidikan merupakan sasaran dan sekaligus sebagai subjek pendidikan. Peserta didik merupakan makhluk Allah yang memiliki fitrah jasmani dan rohani yang belum mencapai taraf kematangan baik bentuk, ukuran, maupun perimbangan pada bagian-bagian lainnya, ia memiliki bakat, kehendak, perasaan, dan pikiran yang dinamis dan perlu dikembangkan.

d. Metode pendidikan

Metode mengajar adalah cara yang digunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. Metode pendidikan Islam adalah jalan atau cara yang dapat ditempuh untuk menyampaikan bahan atau materi pendidikan Islam kepada peserta didik agar terwujud kepribadian muslim. Jenis-jenis metode tersebut antara lain, Simulasi, resitasi/penugasan, sosiodrama, kerja kelompok, eksperimen, problem solving, dan lain-lain.

e. Alat/sarana pendidikan

Alat pendidikan Islam yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Alat/ sarana pendidikan dapat berupa media pendidikan yang berguna untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Media ini dapat berupa audio, visual atau audio visual.

f. Lingkungan

Lingkungan merupakan faktor yang sangat menentukan pengaruhnya sangat besar terhadap peserta didik, sebab bagaimanapun ia tinggal dalam satu lingkungan yang disadari atau tidak akan mempengaruhi peserta didik. Fungsi lingkungan membantu peserta didik berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya.³⁷

³⁷Buseri, Kamrani, *Dasar,Asas, dan Prinsip Pendidikan Islam*, Aswaja Pressindo,Yogyakarta, 2014, hlm. 23-24.

3. Kurikulum Pendidikan Islam

Dalam bahasa arab kurikulum biasa diungkapkan dengan manhaj yang berarti jalan terang yang dilalui manusia pada berbagai bidang kehidupan. Secara etimologis menurut webster Dictionary, kurikulum berarti 1) Tempat berlomba, 2) Pelajaran-pelajaran tertentu yang diberikan di sekolah atau perguruan tinggi yang ditujukan untuk mencapai suatu tingkat, 3) keseluruhan pelajaran yang diberikan dalam suatu lembaga pendidikan.³⁸ Sedangkan menurut tim pengembang KTSP SMP N 1 Pamotan, mendefinisikan kurikulum adalah seprangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan.³⁹ Menurut M Arifin kurikulum adalah seluruh bahan pelajaran yang harus disajikan dalam proses kependidikan dalam suatu sistem institusional pendidikan.⁴⁰ Jadi kurikulum adalah jalan terang yang berupa seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan pembelajaran yang harus disajikan dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.

a. Isi Kurikulum Pendidikan Islam

Abd al-Rahman salih Abdullah dalam Ali Mufron membagi kurikulum pendidikan Islam dalam tiga kategori sebagai berikut

- 1). Al ulum al-diniyyah, yaitu ilmu-ilmu keislaman normatif yang menjadi kerangka acuan bagi segala ilmu yang ada.
- 2). Al ulum al insaniyyah, yaitu ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang berkaitan dengan manusia dan interaksinya, seperti, sosiologi, antropologi, pendidikan dan lain-lain.

³⁸Ngadiyono, Burhan, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah*, BPFE, Yogyakarta, 2010. hlm.21.

³⁹Tim Pengembang KTSP SMP N 1 Pamotan, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Rembang, 2010, hlm 3.

⁴⁰ HM, Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, Husna Zikro, Yogyakarta, 1997, hlm.183.

- 3). Al ulum al-kauniyyah, yaitu ilmu-ilmu keagamaan yang mengandung azas kepastian, seperti, fisika, matematika, kimia, dan lain-lain⁴¹.

b. Sistem Penjenjang Kurikulum Pendidikan Islam

Kurikulum pendidikan Islam bersifat dinamis dan kontinu, disusun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus, terutama masalah masalah kemampuan inteligensi dan mental peserta didik. Sistem penjenjangan kurikulum pendidikan Islam berorientasi pada ,kemampuan, pola, irama, perkembangan dan kematangan mental peserta didik, dari sini dapat ditentukan bobot materi yang diberikan.

- 1). Tingkat dasar (Ibtidaiyyah), bobot materi, syariah, akhlak, hanya menyangkut pokok-pokok ajaran Islam, misalnya rukun Islam, rukun Iman, masalah akhlak.
- 2). Tingkat Menengah Pertama (Tsanawiyyah), bobot materi mencakup materi yang diberikan pada jenjang dasar dan ditambah dengan argumen-argumen dari dalil naqli dan dalil aqli.
- 3). Tingkat Menengah Atas (Aliyah), bobot materinya mencakup bobot materi yang diberikan pada jenjang dasar dan menengah pertama ditambah dengan hikmah dan manfaat dibalik materi yang diberikan.
- 4). Untuk materi perguruan tinggi (jami`iyah) bobot materinya mencakup bobot materi yang diberikan ketika jenjang dasar, menengah dan materi yang bersifat ilmiah dan filosofis.⁴²

c. Orientasi Kurikulum Pendidikan Islam

Kurikulum pendidikan Islam berorientasi pada :

1) Orientasi pelestarian nilai-nilai

Nilai yang dimaksud adalah nilai ilahiyyah, nilai yang turun dari Allah Swt, dan nilai insaniyyah yaitu nilai yang tumbuh dan

⁴¹ Mufron, Ali, Op.Cit, hlm 173-174.

⁴² Mufron, Ali, ibid, hlm. 174-175.

berkembang dari peradaban manusia. Kedua nilai tersebut selanjutnya membentuk norma kehidupan yang dianut dan melembaga pada masyarakat, tugas kurikulum adalah menciptakan situasi dan program untuk mencapai pelestarian kedua nilai tersebut.

2) Orientasi pada peserta didik

Orientasi ini memberikan arah kurikulum untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang disesuaikan dengan minat, bakat, dan potensi yang dimilikinya.

3) Orientasi pada masa depan dan perkembangan IPTEK

Kurikulum disusun menyesuaikan zaman, hampir semua kehidupan tidak lepas dari keterlibatan IPTEK.

4) Orientasi pada sosial demand

Orientasi kurikulum adalah bagaimana memberikan kontribusi positif dalam perkembangan sosial dan kebutuhannya.

5) Orientasi pada tenaga kerja

Kurikulum pendidikan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan kerja, setelah keluar dari lembaga peserta didik mempunyai kemampuan dan keterampilan yang profesional.

6) Orientasi penciptaan lapangan kerja

Kurikulum diarahkan untuk penciptaan lapangan kerja, menciptakan peserta didik terampil agar dapat mengisi lapangan kerja di masyarakat.⁴³

4. Pelaksanaan Pendidikan Islam di Madrasah Tsanawiyah

Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah, memiliki ciri khas khusus yaitu pendidikan agama Islam dan pendidikan umum, mata pelajaran yang diajarkan pada rumpun PAI adalah, Al Qur`an –Hadits, aqidah-akhlaq, Sejarah kebudayaan Islam, Bahasa Arab, sedangkan mata pelajaran umum adalah Pendidikan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika,

⁴³ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan*, Kalam Mulia, Jakarta, 2011, hlm.166-168.

Bahasa Inggris, IPS, IPA, Prakarya, Penjaskes, dan Bahasa Jawa. Melihat dari sisi kekomplekan mata pelajaran yang diberikan, maka pendidikan di madrasah mempunyai kelebihan sekaligus kelemahan.

a. Kelebihan

Bila dipandang sebagai kelebihan maka pendidikan di madrasah lebih menekankan akhlaq pada peserta didik untuk dipersiapkan menjadi generasi yang bertaqwa dengan kemampuan dan pengetahuan yang kompleks, sehingga bekal kemampuan dan pengetahuan tersebut sekarang dan kelak dapat digunakan sebagai pedoman hidup.

b. Kelemahan

Sebaliknya apabila di pandang sebagai kelemahan, banyaknya jumlah mata pelajaran akan menambah jam belajar siswa dan kurang maksimalnya kegiatan pembelajaran akan berdampak pada pemusatan mata pelajaran tertentu, misalnya mata pelajaran yang di ujikan nasional (UN), sehingga hasil pembelajaran secara akademis bila dirata-rata masih kurang memuaskan secara umum.

C. Standart Pembiayaan Pendidikan

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.⁴⁴ Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya operasional, dan biaya personal.

1. Biaya Operasional

Biaya operasional dalam standar pembiayaan pendidikan terdiri-dari :

- a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji
- b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai
- c. Biaya operasional pendidikan tak langsung berupa, daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana prasarana, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan sebagainya.⁴⁵

⁴⁴PP No 19 Tahun 2005.

2. Biaya Personal

Biaya personal merupakan biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan, antara lain meliputi pakaian, transpor, buku, konsumsi, dan akomodasi.

Di dalam Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pembiayaan pendidikan terdiri dari biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap. PP ini diperkuat dengan PP No 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, di mana biaya pendidikan meliputi biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik. Biaya satuan pendidikan terdiri dari biaya investasi, biaya operasi, bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa. Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan terdiri dari biaya investasi dan biaya operasional. PP No 48 tahun 2008 ini sifatnya melengkapi dan mengukuhkan PP No 19 tahun 2005, tidak ada pemberlakuan standar ganda pada penggunaan kedua PP tersebut, karena PP No 48 tahun 2008 memberikan penafsiran yang lebih jelas terhadap PP no 19 tahun 2005 tentang pendanaan pendidikan.

D. Sistem Pembiayaan Pendidikan Islam Di Madrasah

1. Konsep Pembiayaan Pendidikan di Sekolah/Madrasah.

Biaya pendidikan adalah nilai rupiah yang digunakan untuk kegiatan pendidikan yang terdiri dari seluruh sumber daya.⁴⁵ Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa yang berupa pembelian alat –alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang

⁴⁵Fatah, Nanang, *Standar Pembiayaan Pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012, hlm.93.,

⁴⁶Fatah, Nanang, *Ibid*, hlm 96.

dikeluarkan pemerintah, orangtua, maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang yang dikorbankan siswa selama belajar.⁴⁷

Pembiayaan pendidikan merupakan aktifitas yang berkenaan dengan perolehan dana (pendapatan) yang diterima dan bagaimana penggunaan dana tersebut digunakan untuk membiayai seluruh program pendidikan yang telah ditetapkan.⁴⁸ Sistem pembiayaan pendidikan merupakan proses dimana pendapatan dan sumber dana tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah/madrasah. Pendapatan atau sumber dana pendidikan diperoleh dari APBN, APBD, dan masyarakat atau orangtua.

Menurut Levin dalam Akdon, pembiayaan sekolah adalah proses di mana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah di berbagai wilayah geografis dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda.⁴⁹ Jadi pembiayaan pendidikan adalah aktifitas mengelola pendanaan pendidikan yang berwujud uang dan barang untuk membiayai program kegiatan pendidikan yang telah ditetapkan.

Setiap kebijakan dalam pembiayaan sekolah/madrasah akan mempengaruhi bagaimana sumber daya diperoleh dan dialokasikan dan digunakan sebesar besarnya untuk mencerdaskan peserta didik dan peningkatan mutu.

Pembiayaan merupakan hal penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pendidikan, dan pemerintah memiliki peran yang besar di dalamnya. Agar penggunaan dana efektif setiap lembaga pendidikan, madrasah/sekolah seharusnya menetapkan rencana yang menjadi prioritas pembiayaan pendidikan secara komprehensif dari program pembiayaan yang melibatkan keputusan yang kritis dalam wilayah program pendidikan yang harus dibiayai, sistem pajak yang digunakan untuk pembiayaan program,

⁴⁷Fatah, Nanang, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012, hlm.23.

⁴⁸ Akdon, *et.al*, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015, hal.23.

⁴⁹ Ibid hlm.28.

dan sistem alokasi dana negara untuk wilayah atau daerah persekolahan. Fungsi pembiayaan adalah untuk mendukung agar penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan landasan dan misi yang diemban bangsa.

Konsep pembiayaan identik dengan anggaran. Anggaran merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif pada bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan lembaga pada kurun waktu tertentu. Anggaran pembiayaan pendidikan disusun untuk menggambarkan seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan oleh madrasah/lembaga pendidikan. Anggaran dapat berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian pada manajemen pembiayaan pendidikan untuk mengarahkan madrasah/sekolah dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Dalam arti yang lebih makro anggaran mempunyai fungsi:

- a. Sebagai alat penafsir , yaitu untuk memperkirakan besarnya pendapatan dan pengeluaran sehingga dapat dilihat kebutuhan data yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan di madrasah/lembaga.
- b. Sebagai alat kewenangan yaitu dapat memberikan kewenangan untuk pengeluaran dana sehingga melalui anggaran tersebut dapat diketahui besarnya dana yang boleh dikeluarkan untuk membiayai kegiatan berdasarkan perencanaan anggaran sebelumnya.
- c. Sebagai alat efisiensi yaitu dapat diketahuinya, realisasinya sebuah kegiatan yang kemudian dapat dibandingkan dengan perencanaan, sehingga dapat dianalisis ada tidaknya pemborosan atau penghematan anggaran.⁵⁰

Menurut John , Morphet , dan Alexanders, dalam Akdon, ada beberapa kebijakan umum yang biasa dianjurkan oleh ahli pembiayaan pendidikan antara lain :

- 1) Jika masukan biaya tambahan akan menambah lebih banyak keuntungan secara individu dan sosial sistem pendidikan dibandingkan

⁵⁰ Luneto, Buhari , *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Madrasah*, Tadbir, Vol 3, No.2, 2015,hlm 23.

dengan jumlah investasi, maka masukan pembiayaan harus ditingkatkan.

- 2) Jika keuntungan secara individual dan sosial dari sistem organisasi dapat menghasilkan dengan masukan biaya yang lebih kecil, maka masukan pembiayaan seharusnya dikurangi.
- 3) Jika unit administrasi sekolah merupakan unit yang sangat kecil dapat mencapai keuntungan dalam skala ekonomi penting untuk memaksimalkan keuntungan pendidikan, per rupiah masukannya, maka sistem sekolah/madrasah itu harus ditinjau organisasinya secara tepat.
- 4) Jika struktur organisasi tidak berfungsi secara efisien dan efektif untuk memaksimalkan keuntungan pendidikan, maka struktur organisasi itu harus di modifikasi.
- 5) Jika setiap kebijakan pendidikan, program atau cara kerja tidak berfungsi, tidak efektif/efisien , maka kebijakan pendidikan harus diubah.⁵¹

Pendidikan dalam operasionalnya tidak terlepas dari pembiayaan atau moneter. Biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk , penyelenggaraan pendidikan tidak akan tampak hasilnya secara nyata dalam waktu yang relatif singkat , oleh karena itu uang yang dikeluarkan pemerintah, masyarakat, maupun orangtua, untuk menghasilkan pendidikan atau membeli pendidikan bagi anaknya dipandang sebagai investasi, yang dimasa mendatang akan menghasilkan keuntungan atau manfaat dalam bentuk finansial dan non finansial⁵². Dukungan finansial yang cukup akan mempermudah memanagerial suatu lembaga pendidikan untuk berbuat banyak dalam upaya memajukan lembaga pendidikan yang dipimpin. Keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Kedua hal tersebut merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan

⁵¹ Akdon, *et.al*, Op.Cit, hlm. 25-26.

⁵² Fattah, Nanang, Op.Cit , hlm. 6-7.

proses belajar mengajar di sekolah/ madrasah bersama komponen-komponen lainnya.

Pembiayaan pendidikan sangat terkait dengan kepercayaan masyarakat untuk turut andil dan merasa memiliki lembaga tersebut, oleh karenanya jika madrasah/lembaga ingin mendapatkan dana dari partisipasi masyarakat maka madrasah/lembaga harus memiliki program yang bagus. Kepercayaan memang dapat membangunkan kesadaran seseorang untuk memberikan bantuan dana. Dengan demikian kepercayaan masyarakat, terutama para agniya calon donatur , harus diperkuat dan dijaga. Untuk membangun dan memperkuat kepercayaan mereka. Ada beberapa langkah yang perlu ditempuh , yaitu :

1. Pihak yang mengajukan proposal kepada calon donatur haruslah orang yang jujur, bersih dan amanat.
2. Lembaga pendidikan harus mampu menunjukkan bahwa bantuan dari pihak lain yang diterima telah dimanfaatkan secara benar dan dapat dibuktikan.
3. Pihak yang mengajukan bantuan bersama kelompoknya haruslah orang-orang yang dikenal memiliki semangat besar untuk menghidupkan dan memajukan lembaga.
4. Calon donatur harus bisa diyakinkan bahwa pelaksanaan program benar-benar sangat penting , bahkan mendesak untuk segera diwujudkan
5. Calon donatur perlu disadarkan bahwa bantuan yang akan diberikan untuk pembangunan lembaga pendidikan merupakan shadaqah jariyah yang pahalanya terus mengalir.⁵³

2. Bentuk-Bentuk Desain Anggaran Pembiayaan

Sedikitnya ada empat bentuk desain anggaran pembiayaan pendidikan yang dianut sekolah/madrasah. Menurut Nanang Fattah,

⁵³Qomar, Mujamil, Op. Cit, hlm .165.

bentuk- bentuk desain anggaran pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Anggaran butir per butir

Merupakan anggaran yang paling simpel dan banyak digunakan. Setiap pengeluaran dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori, misalnya gaji, upah, honor, menjadi satu kategori.

b. Anggaran program

Adalah bentuk anggaran yang dirancang untuk mengidentifikasi biaya setiap program. Perhitungan anggaran pembiayaan berdasarkan pada perhitungan masing-masing jenis program.

c. Anggaran berdasarkan hasil

Adalah bentuk anggaran yang menekankan hasil , bukan pada keterperincian dari suatu alokasi anggaran.

d. Sistem perencanaan penyusunan program dan penganggaran

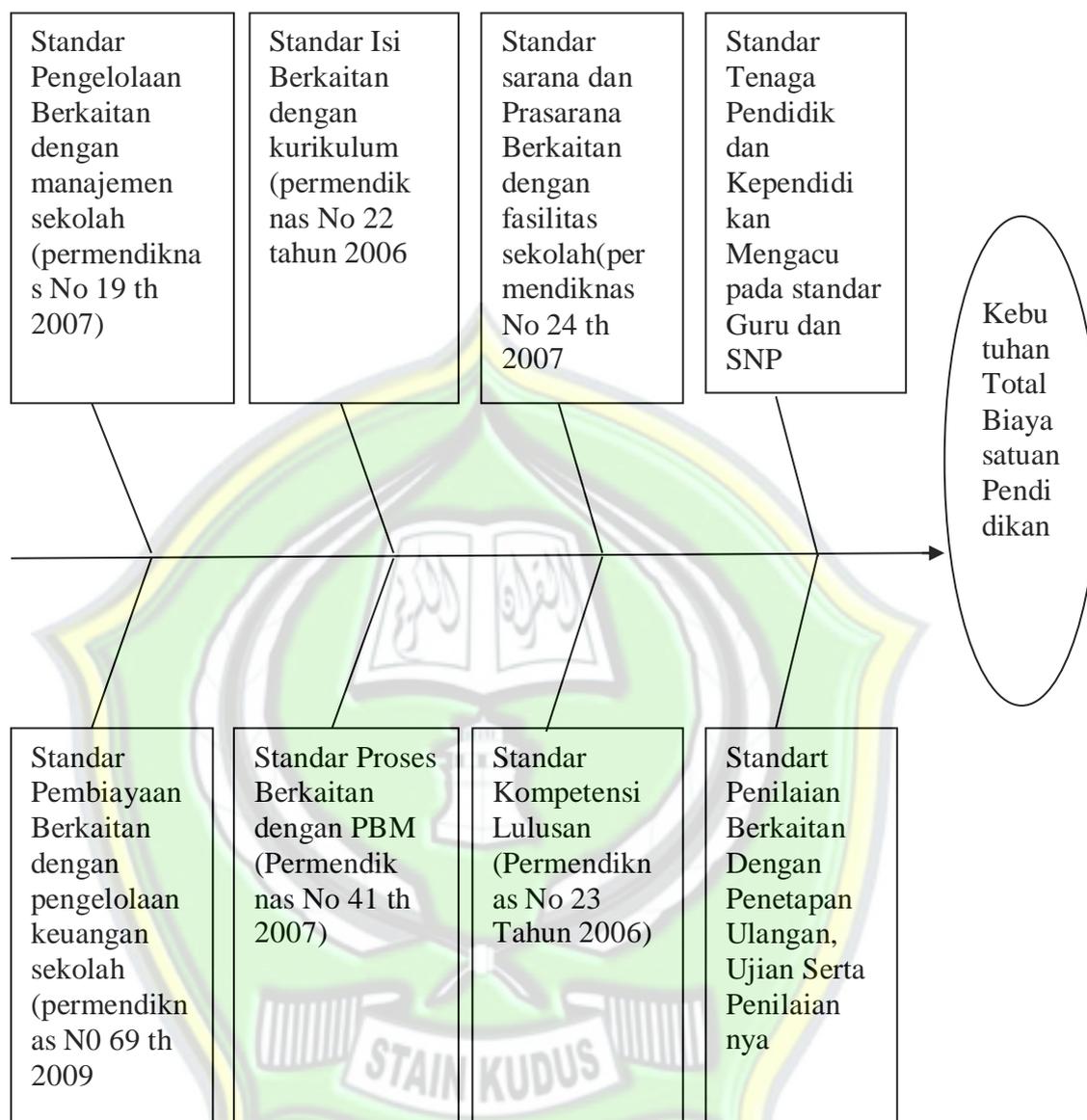
Adalah sebuah kerangka kerja dalam perencanaan dengan mengorganisasikan informasi dan menganalisisnya secara sistematis. Setiap program dinyatakan dengan jelas, baik jangka pendek, maupun jangka panjang. Semua tentang biaya, keuntungan, kelayakan suatu program, disajikan secara lengkap, sehingga pengambil keputusan dapat menentukan pilihan program yang dianggap paling menguntungkan.⁵⁴

3. Implementasi Pembiayaan Pendidikan

a. Penerapan Konsep Model dalam Biaya Satuan Pendidikan

Konsep model penentuan biaya sekolah/madrasah dapat digambarkan dalam model fishbone atau model tulang ikan. Penentuan biaya sekolah/madrasah dikelompokkan menjadi 8 komponen, sesuai standar komonen pendidikan nasional. Berikut adalah gambar model pengalokasian pembiayaan di sekolah/madrasah.

⁵⁴Fattah, Nanang, *Standar Pembiayaan Pendidikan*, Op.Cit, hlm.55-56.



Gambar 1. Konsep Model Penentuan Biaya satuan Madrasah

Pengelompokan komponen biaya tersebut diambil sebagai komponen minimal yang dilaksanakan di sekolah/madrasah.

Asumsi model penentuan biaya satuan untuk sekolah/madrasah yang mungkin dapat dialokasikan adalah sebagai berikut :

- 1) Pengeluaran kebutuhan pokok per siswa pertahun
- 2) Pengeluaran untuk guru per tahun berdasarkan rasio guru-murid

- 3) Pengeluaran untuk bahan dan alat pelajaran per siswa per tahun dengan rasio buku : siswa
- 4) Pengeluaran untuk bahan dan alat pelajaran habis pakai untuk praktikum per siswa per tahun.
- 5).Pengeluaran untuk pemeliharaan seluruh sarana akademik (gedung) per siswa per tahun.
- 6) Pengeluaran untuk manajemen sekolah
- 7) Pengeluaran untuk ujian sekolah untuk pembelian bahan, alat tulis, sekolah, dan transpor guru.
- 8).Pengeluaran untuk daya dan jasa
- 9).Pengeluaran untuk penunjang pertahun⁵⁵.

Agar lebih jelas kondisi tersebut dapat di gambarkan pada bagan berikut.



Gambar. 2. Biaya Pendidikan.

4. Unsur-Unsur Model Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di Madrasah

Struktur pengembangan model pengelolaan pembiayaan madrasah berdasarkan kebutuhan belajar dibangun berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh madrasah. Dalam mengalokasikan dana, madrasah hanya mengalokasikan dana berdasarkan pengalaman yang sudah dilaksanakan sebelumnya, kurang memfokuskan pada program yang sebenarnya perlu dibiayai sehingga kurang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Struktur model pengelolaan pembiayaan madrasah yang dibangun terdiri dari unsur-unsur yang saling berhubungan dalam pengelolaan pembiayaan di

⁵⁵Akdon, et.al , Op. Cit, hlm.48.

madrasah agar pendistribusian dana mampu dialokasikan berdasarkan program dalam melaksanakan PBM dan sesuai kebutuhan siswa. Unsur-unsur tersebut adalah

e. Kebutuhan belajar peserta didik

Pendidikan yang dibutuhkan peserta didik adalah ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kecakapan dasar untuk tumbuh dan berkembang ke jenjang yang lebih tinggi yang didukung nilai-nilai agama

f. Program atau kegiatan prioritas

Unsur ini merupakan dasar dalam mencapai tujuan dan sasaran PBM, serta untuk menentukan pendistribusian dan pengalokasian dana sehingga penggunaannya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Contoh, Pengembangan kurikulum, ekstra kurikuler, penentuan SKL, Peningkatan kompetensi guru, penyediaan buku referensi, PSB, Bantuan siswa miskin, Kegiatan ulangan harian dan penyediaan alat peraga edukatif.

g. Tujuan atau sasaran

Unsur ini merupakan arah yang akan dicapai oleh sekolah/madrasah dalam melaksanakan PBM.

h. Peserta didik

Unsur ini memberikan gambaran jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan di madrasah/sekolah sehingga diketahui bobot besaran biaya yang dibutuhkan untuk setiap sekolah/madrasah.

i. Distribusi dan alokasi dana

Unsur ini merupakan pedoman bagi sekolah/madrasah dalam mendistribusikan dan mengalokasikan dana yang diperoleh untuk dipergunakan secara efektif dan efisien dalam melaksanakan PBM.

j. Sumber dana

Unsur ini memberikan gambaran tentang dari mana sekolah/madrasah mendapatkan sumber-sumber pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di madrasah

k. Standar nasional pendidikan

Unsur ini merupakan landasan dalam memetakan kebutuhan belajar peserta didik.⁵⁶

5. Model –Model Pembiayaan Pendidikan

Menurut Thomas H. Jones dalam Armida ada enam model pembiayaan pendidikan, yaitu :

a. Model Flat Grant

Model ini merupakan tipe perencanaan bantuan pembiayaan pendidikan yang tertua, dengan konsep setiap sekolah/madrasah memiliki sejumlah dana yang sama, yang dihitung persiswa atau per unit pendanaan lainnya. Sekolah/madrasah dengan jumlah siswa terbanyak akan mendapat dana lebih besar. Semua sekolah akan mendapatkan bantuan yang sama terlepas dari seberapa besar kekayaan yang dipunyai madrasah/sekolah atau seberapa rendah tarif pajak yang mereka berlakukan. Model ini diadopsi pemerintah pusat dalam mendistribusikan dana bantuan operasional siswa (BOS).

b. Model Power Equalizing

Model Power Equalizing membebankan kepada kabupaten yang sangat kaya untuk membayarkan pajak sekolah yang dipungut kembali ke kas negara, negara menggunakan dari kabupaten yang kaya untuk menambah bantuan bagi kabupaten/distrik yang miskin. Setiap daerah akan menerima jumlah dana yang berbeda tergantung pada kemampuan penghasilan daerah. Daerah miskin akan menerima 5 persmil ditambah 7 persmil dana dasar daerah, sehingga terdapat keseimbangan dana antar daerah-daerah yang sumber alamnya kaya.

a. Model Complete State

Model complete state , merancang pembiayaan pendidikan untuk menghapus semua perbedaan lokal, baik dalam pembelanjaan maupun dalam perolehan pajak.Tidak ada pajak property sekolah

⁵⁶ Akdon,et.al, Op.Cit.hlm. 144-145.

lokal dengan berbagai tarif . Pengawasan keuangan lokal tidak efisien untuk masyarakat secara keseluruhan. Model complete state menempatkan tanggungjawab yang lebih besar untuk akuntabilitas pendidikan secara merata di berbagai propinsi dan kabupaten/kotamadya.

b. Model Foundation Plan

Model ini dirancang untuk menggali masalah –masalah besar dalam pendidikan dan keuangan, yaitu : kesetaraan pembelanjaan, penetapan standar pajak dan pembelanjaan sekolah minimum. Pemisahan wewenang politik antar propinsi adalah kebijakan untuk proses perbaikan yang berkesinambungan atas proses pendidikan. Prinsip pembiayaan pendidikan model Foundation plan , Negara menentukan biaya pendidikan per siswa per tahun bagi program pendidikan yang memuaskan, Negara menentukan tariff pajak minimum yang harus dilakukan oleh semua propinsi dan kabupaten dengan jumlah yang sama, Negara memberikan hibah (grants) kepada tiap kabupaten/kota dengan jumlah yang sama, sedangkan nominal bantuan besarnya situasional terhadap kekayaan lokal tetapi tidak pada upaya pajak. Pembagian pembiayaan pendidikan dibagi dengan porsi yang sama dengan mengutamakan kabupaten yang miskin.

c. Model Guaranteed Percent equalizing

Model ini dimaksudkan bahwa Negara membayar persentase tertentu dari total pembiayaan pendidikan yang diinginkan oleh kabupaten/distrik sekolah lokal. Penyertaan persentase Negara diberlakukan tinggi pada distrik-distrik sekolah miskin, dan persentase sekolah rendah pada distrik kaya. Model ini memaksimalkan pengawasan lokal, kesetaraan wajib pajak, dan efisiensi sekolah lokal. Guaranteed percent equalizing, menjamin tiap distrik sekolah lokal dengan sejumlah dana tertentu.

d. Model complete Local Support

Pembiayaan pendidikan bersumber pada dana pemerintah, dan diharapkan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sistem ini akan memberikan dampak pada system pendidikan yang ada di daerah.⁵⁷

Apabila dilihat dari konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, prinsip pembiayaan tersebut akan memiliki kesamaan seperti yang dikemukakan Jones. Daerah-daerah di Indonesia memiliki karakteristik yang sangat unik antara satu daerah dengan daerah lainnya sehingga tidak mungkin menyamakan pembiayaan pendidikan untuk setiap daerah.⁵⁸

6. Strategi Pembiayaan Pendidikan Dalam Penyusunan RAPBM

Strategi adalah keputusan atau tindakan untuk mencapai sasaran organisasi.⁵⁹ Strategi dipengaruhi oleh misi organisasi atau lembaga (madrasah/sekolah) dan lingkungannya. Penyusunan RAPBM memerlukan analisis masa lalu dan lingkungan eksteren yang mencakup kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (Analisis SWOT). Dunia pendidikan sangat terpengaruh oleh berbagai perubahan baik politik, sosial budaya, ekonomi, teknologi, industri maupun informasi. Pembaharuan dalam aspek-aspek tersebut menuntut para pengambil keputusan kebijakan pendidikan menyesuaikan diri, dengan perubahan tersebut. Strategi pembiayaan pendidikan dalam penyusunan RAPBM di mulai dengan mengkaji perubahan peraturan perundangan dan tuntutan peningkatan mutu pendidikan . Pada dasarnya konsep strategi ada 6 , yaitu :

- a. Suatu pola keputusan yang integrity, coherent, dan menyatu diantara setiap komponen.

⁵⁷Armida, *Model Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia*, Media Akademika, Vol.26, No.1, 2011, Fakultas Adab IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, hlm. 145-148.

⁵⁸Akdon, et.al, Op.Cit. hlm.34.

⁵⁹Fatah, Nanang, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Op.Cit , hlm.54.

- b. Menentukan dan mengembangkan tujuan lembaga yang dinyatakan dalam sasaran jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah, program dan prioritas dari alokasi sumber dana pendidikan.
- c. Memilih jenis kemampuan , keterampilan, pengetahuan, apa saja yang mungkin akan diperlukan oleh masyarakat di masa yang akan datang.
- d. Merespon dengan cepat semua peluang dan ancaman, kelemahan, dan keunggulan yang ada di bidang lembaga pendidikan.
- e. Membangun komitmen dari semua pihak , siswa, orangtua, masyarakat, pemerintah, unit-unit depdiknas, sampai pada internal sekolah untuk bersama-sama meningkatkan mutu sekolah.
- f. Menentukan tingkat kontribusi dari setiap input pendidikan yang bermuatan biaya terhadap mutu pendidikan atau prestasi belajar siswa dan angka permintaan masyarakat terhadap lulusan sekolah.⁶⁰ Strategi RAPBM/S sangat dipengaruhi oleh misi dan faktor lingkungan pendidikan (madrasah/sekolah).

Lingkungan pendidikan dapat digolongkan menjadi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal sekolah mencakup tenaga kependidikan, sarpras, kelengkapan fasilitas, dan biaya yang tersedia di setiap sekolah. Sedangkan lingkungan eksternal sekolah mencakup kondisi sosial , ekonomi dan aspirasi masyarakat. Keadaan sosial ekonomi orangtua, globalisasi informasi dan teknologi dan industri yang berkembang sangat cepat akan memberikan pengaruh terhadap hasil-hasil pendidikan . Sebagai pilihan pola pengelolaan strategi pembiayaan berikut disajikan strategi pembiayaan berdasarkan sumber pendanaan.

⁶⁰ Fatah, Nanang, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Op.Cit, hlm 55.

Sumber Dana	Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
A.Pemerintah Pusat 1. DIK	Masih diatur di tingkat pusat	Diatur ditingkat pusat (untuk gaji atau komponen lain diatur di tingkat I atau II)	Semua komponen biaya diatur oleh pemda TK II dan Sekolah/madrasah mempunyai kelonggaran untuk mengatur.
2. DIP, BOP, SBPP	Masih diatur di tingkat pusat berdasarkan prioritas kebutuhan	Pemda TK I mempunyai kewenangan mengelola keuangan	Pemda TK II dan Sekolah mempunyai kewenangan untuk mengelola keuangan secara penuh.
3. Bantuan /Blok Grant	Diterima langsung Pemda TK II berdasarkan konsultasi dengan pemerintah pusat	Diterimah langsung oleh Sekolah dengan arahan Pemda TK II	Diterima Langsung oleh sekolah dengan kewenangan penuh untuk mengelola.
4. Sumbagan dari Orangtua	Dikelolah penuh oleh sekolah berdasarkan	Dikelolah penuh oleh sekolah berdasarkan	Dikelolah penuh oleh sekolah

/Komite Sekolah	kesepakatan dengan Komite Sekolah disertai kemampuan Sekolah	kesepakatan dengan Komite Sekolah disertai kemampuan Sekolah	berdasarkan kesepakatan dengan Komite Sekolah disertai kemampuan Sekolah
5. Sumbangan Masyarakat/ Dunia Usaha/Yaya San	Sda	Sda	Sda

CONTOH DESAIN RAPBM (RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA MADRASAH TAHUN PELAJARAN 20..../20.....

Komponen Kebutuhan dan Rinciannya	Analisis Perhitungan dan Harga Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
a.Peningkatan P BM 15 %		
a.1.Pelaksanaan Tes		
1. Penyusunan Naskah	...Naskah x Rp...	Rp.....
2. Penggandaan Naskah Di Sekolah	...Naskah x Rp...	Rp.....
3.Penggandaan Naskah Dari tim Khusus	(untuk ...Siswa) ...Siswa x...Rp...	Rp.....
4.Pengawasan/ Pemeriksaan Tes		
	Jumlah 1 Kali Pelaksanaan	Rp.....
	Jumlah 2 kali Pelaksanaan	Rp.....
5.Pemantapan /Evaluasi UN Kelas IX Siswax Rp.....	Rp
6.....Siswa x Rp.....	Rp.....
7Siswa x Rp.....	Rp.....
	Jumlah (a.1)	Rp
a.2.Belanja Alat PBM (20 %) kelas x Rp...	Rp.....

1.Spidol whaite Board 2. Mistar 3. Kertas Kwarto A4 70 4.Kertas Kwarto A5 70 gr 5. Tinta Spidol 6. Penghapus 7.Jangka 8.Busur 9.Buku Pelajaran 10.Alat lainnyaKelas x Rp...Rim x Rp.....Rim x Rp.....Kelas x Rp...Kelas x Rp.....Kelas x Rp..... ...Kelas x Rp.....Siswa x mapel x Rp...	Rp..... Rp..... Rp..... Rp..... Rp..... Rp..... Rp..... Rp.....
	Jumlah (a.2)	Rp.....
b.Pemeliharaan dan Peng gantian Sarpras Pendidikan (15 %) 1.Pemeliharaan Mebel 2. Pengadaan Mebel 3. Pemeliharaan Kelas 4.Pemeliharaan kantor 5. Pemeliharaan Halaman 6.Pemeliharaan kebersihan 7. Bahan/alat kebersihan 8. Rehab ringan kelas 9.Pembuatan almari 10.Pembuatan meja dan Bangku Siswa	Disediakan Disediakan Disediakan Disediakan Disediakan Disediakan Disediakan Disediakan Disediakan Disediakan	Rp..... Rp..... Rp..... Rp..... Rp..... Rp..... Rp..... Rp..... Rp..... Rp.....
	Jumlah (b)	Rp.....
c.Peningkatan Pembinaan ke giatan Siswa, Latihan dan Sarana (15 %) 1.Pramuka 2.PMR 3.UKS 4. OSN 5.KIR 6. Prestasi Olahraga 7. Kegiatan Porseni 8.Pesantren kilat 9.PHBI 10.PHBN 11.Pelepasan Siswa Kelas	Disediakan Disediakan Disediakan Disediakan Disediakan Disediakan Disediakan Disediakan Disediakan Disediakan Disediakan	Rp..... Rp..... Rp..... Rp..... Rp..... Rp..... Rp..... Rp..... Rp..... Rp..... Rp.....

IX 12.Lomba-lomba	Disediakan	Rp.....
	Jumlah (c)	Rp.....
d.Kesejahteraan (20%) 1.Honorarium PTT/GTT 2.Peningkatan Mutu Kete rampilan Guru 3.Perjalanan Dinas Guru 4.Perjalanan Dinas Kasek 5.Publikasi Ilmiah 6. lainnya	12 bulan x Rp... 12 bulan x Rp... 12 bulan x Rp... 12 bulan x Rp... 12 bulan x Rp...	Rp..... Rp..... Rp..... Rp..... Rp.....
	Jumlah (d)	Rp.....
e.Rumah tangga madrasah dan komite madrasah (10%) 1. Tata usaha 2. Rapat Kerja Komite sekolah/madrasah 3. Rapat tahunan komite sekolah/madrasah 4. Rapat kenaikan Kelas 5. Rapat kerja Madrasah	12 bulan x Rp... ...Komite x Rp...orangtua x Rp....guru x Rp.... ...guru x Rp.....	Rp..... Rp..... Rp..... Rp..... Rp.....
	Jumlah (e)	Rp.....
f.Manajemen Madrasah. (5 %) 1. Pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan Pelaporan 2. Pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan Pelaporan Tingkat kabupaten x Rp.....x Rp....	Rp..... Rp.....
	Jumlah (f)	Rp.....

Jumlah biaya yang diperlukan seluruhnya dari poin a sampai f :

Sebesar Rp

1. Biaya yang diperoleh rutin:

- a. Biaya BOS Rp.....
- b. Biaya SBPPS Rp.....
- Jumlah Rp.....
- Kekurangan Biaya Rp.....

Untuk menutupi kekurangan biaya, dianggarkan dari :

- a. Sumbangan Komite sekolah Rp.....
- b. Sumbangan dunia Usaha Rp.....

Mengetahui Ketua Komite	Rembang , Mengetahui Kepala Madrasah
Mengetahui Kepala Kantor Kemenag Rembang	

E. Penghitungan Biaya Pendidikan

Anggaran biaya pendidikan terdiri dari anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran . Anggaran penerimaan adalah pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah/madrasah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur, yang terdiri dari pemerintah pusat, pemda, masyarakat, dan orangtua siswa, sedangkan anggaran pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah/madrasah.⁶¹ Pengeluaran madrasah dapat dikatagorikan ke dalam beberapa item pengeluaran, yaitu : Pengeluaran untuk pelaksanaan

⁶¹Fattah, Nanang, *Ekonomi dan Pembiayaan, Pendidikan*, PT Remaja RosdaKarya, Bandung, 2012, hlm.24.

pelajaran, tata usaha, sarana dan prasarana madrasah, kesejahteraan pegawai, administrasi, pembinaan teknis educative dan pendataan. Jadi penghitungan biaya pendidikan akan ditentukan oleh unsur-unsur tersebut yang didasarkan pada perhitungan biaya nyata.

Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan ,menghitung biaya satuan pendidikan di madrasah dengan menjumlahkan komponen-komponen pengeluaran dalam anggaran pendapatan dan belanja madrasah (APBM) dan di luar APBM. Komponen pengeluaran meliputi gaji dan bukan gaji, komponen bukan gaji mencakup pengeluaran untuk pemeliharaan, pengadaan, dan sarana penunjang belajar.⁶² Menurut Nanang Fatah, terdapat dua pendekatan dalam menentukan biaya satuan, yaitu pendekatan makro dan mikro. Pendekatan makro mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana kemudian dibagi jumlah murid. Pendekatan mikro mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidikan yang digunakan oleh murid.

Perhitungan ini dapat di rumuskan $S_b(s,t) = f [K (s,t)] : M(s,t)$

Dimana S_b : satuan biaya per siswa per tahun, K : jumlah seluruh pengeluaran, M : Jumlah murid, s : Sekolah tertentu, dan t : tahun tertentu.

Penghitungan biaya perlu dilakukan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Adapun prosedur perhitungan biaya adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya pendidikan yang habis pakai, baik jenis dan spesifikasi/kualifikasi maupun jumlahnya berdasarkan standar nasional pendidikan dan data sekolah.
2. Mengklasifikasikan sumber daya pendidikan yang habis pakai ke dalam pendidik dan tenaga kependidikan, bahan dan alat habis pakai serta pemeliharaannya.
3. Mentransformasi kebutuhan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan dan bahan habis pakai dan pemeliharaan ke biaya

⁶²Akdon, et.al, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Op.Cit.* hlm.22.

operasional pendidik dan tenaga kependidikan dan biaya operasional bahan dan alat habis pakai dan pemeliharaan.

4. Mencari informasi harga satuan komponen pendidik dan tenaga kependidikan dan bahan dan alat habis pakai dan pemeliharaan.
5. Menghitung biaya satuan operasional per sekolah/madrasah, per rombongan belajar, dan per siswa.⁶³

Pembiayaan pendidikan di madrasah /sekolah dapat diketahui dari anggaran penerimaan dan pengeluaran. Anggaran penerimaan adalah pendapatan yang diperoleh setiap tahun dari berbagai sumber dan diterima secara teratur. Anggaran penerimaan berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, orangtua siswa, dan sumbangan masyarakat. Anggaran pengeluaran pendidikan merupakan jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun . Belanja sekolah ditentukan oleh unsur-unsur yang jumlah dan perbandingannya bervariasi baik ditinjau dari jenis dan jenjang sekolah, daerah, maupun waktu. Unsur-unsur pengeluaran sekolah/madrasah secara umum meliputi , pelaksanaan pembelajaran, tata usaha, pemeliharaan sarana dan prasarana, kesejahteraan pegawai, administrasi, pembinaan teknis edukatif, dan pendataan.⁶⁴

Menentukan biaya pendidikan di Madrasah/sekolah perlu dianalisis biaya total (*total cost*) dan biaya satuan siswa (*unit cost*). Biaya total , disebut juga biaya satuan sekolah yang merupakan kumpulan biaya yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan orangtua siswa yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan pendidikan selama satu tahun pelajaran. Biaya satuan siswa merupakan ukuran yang menggambarkan besaran uang yang dialokasikan madrasah/sekolah untuk kepentingan siswa dalam menempuh pendidikan. Dengan menganalisis biaya satuan ini dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya di setiap madrasah/sekolah, manfaat dari investasi pendidikan, dan pengeluaran keluarga, masyarakat, pemerintah , dalam penyelenggaraan pendidikan.

⁶³Fatah, Nanang, *Standar Pembiayaan Pendidikan*, Op.Cit. hlm. 97

⁶⁴Fattah ,Nanang,*Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan*,Op.Cit , hlm.24.

Sifat biaya pendidikan sangat kompleks karena komponen biaya itu berbeda antara jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Demikian pula biaya pendidikan bukan hanya berbentuk uang, tetapi juga dalam bentuk biaya kesempatan, dan sumber daya lain yang digunakan untuk menunjang pendidikan. Biaya kesempatan tersebut sering disebut *income forgone*, yakni potensi pendapatan bagi seorang siswa selama mengikuti pelajaran atau menyelesaikan pendidikan. Demikian pula biaya kesempatan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan akan berbeda jumlahnya. Itulah sebabnya, karena biaya pendidikan terdiri atas biaya langsung dan biaya tak langsung, maka perhitungan biaya pendidikan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : $C = L + K$

Dengan :

C = biaya

L = biaya langsung yang dibayarkan untuk bersekolah di jenjang pendidikan tertentu.

K = Jumlah rata-rata penghasilan tamatan pendidikan di bawahnya.⁶⁵

Penghitungan biaya pendidikan mengklasifikasi biaya pendidikan menjadi : biaya satuan pendidikan tingkat orangtua siswa, tingkat sekolah, dan tingkat daerah. Biaya satuan pendidikan di tingkat orangtua meliputi, biaya buku dan alat tulis sekolah, biaya pakaian dan perlengkapan sekolah, biaya akomodasi, biaya transportasi, biaya konsumsi, biaya kesehatan, biaya karyawisata, uang saku, kursus, iuran sekolah, biaya satuan pendidikan tingkat orangtua siswa, tingkat sekolah, dan tingkat daerah. Biaya satuan pendidikan tingkat orang tua siswa meliputi : biaya buku dan alat tulis sekolah, biaya pakaian dan perlengkapan sekolah, biaya akomodasi, biaya transportasi, biaya konsumsi, biaya kesehatan, biaya karyawisata, uang saku, biaya kursus. Iuran madrasah, dan biaya kesempatan. Biaya satuan pendidikan ini dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh biaya pendidikan untuk keperluan satu siswa dalam satu tahun.⁶⁶ Biaya satuan juga dibedakan

⁶⁵Fattah, Nanang, *Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan*, Op.Cit. hlm.25

⁶⁶Fattah, Nanang, Op.Cit.hlm. 24.

dari satuan di tingkat orangtua siswa secara keseluruhan yang didalamnya termasuk biaya kesempatan. Untuk menghitung biaya kebutuhan siswa per tahun dapat dilakukan dengan cara menghitung pengeluaran per komponen sekaligus secara keseluruhan selama satu tahun, atau merinci setiap komponen menjadi sub-sub komponen terlebih dahulu. Cara menghitung biaya masing-masing sub komponen per tahun adalah dengan menjumlahkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk keperluan masing-masing sub komponen selama satu tahun. Biaya satuan pendidikan di tingkat sekolah/madrasah merupakan biaya yang dikeluarkan di tingkat sekolah untuk keperluan proses pembelajaran. Biaya di tingkat sekolah ini dapat diklasifikasikan ke dalam biaya operasional lancar dan biaya investasi/modal.

Biaya operasional yang digunakan untuk memperlancar proses pembelajaran meliputi, biaya satuan pendidikan, operasional personil, yang meliputi perhitungan biaya kesejahteraan personel. Perhitungan biaya pengembangan personil dan biaya satuan pendidikan operasional bukan personil meliputi, biaya alat tulis, biaya daya dan jasa, biaya pembinaan, pemantauan, pengawasan, pelaporan, biaya rapat, dan biaya komite sekolah/madrasah.

Biaya investasi/modal yaitu biaya yang ditimbulkan dari pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan yang dimanfaatkan dalam waktu lebih dari satu tahun per siswa per tahun. Biaya investasi atau modal mencakup, biaya tanah, biaya taman, biaya fasilitas olahraga, biaya bangunan, biaya peralatan, dan perlengkapan, biaya perabot dan meubeler, biaya buku teks, buku sumber, dan buku bacaan, biaya bangunan dan lainnya dihitung dengan menaksir nilai total depresiasi tahunan atau biaya pengembalian modal yang dapat dihitung dengan rumus :

$$D = \frac{P - S}{N}$$

Keterangan :

D = depresiasi tahunan

P = nilai investasi

S = nilai sisa pada akhir umur pakai bangunan

N = umur pakai bangunan

Biaya satuan pendidikan di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat yaitu biaya overhead pemerintah. Biaya ini dihitung dengan cara menghitung biaya operasional (personil dan bukan personil) serta biaya investasi atau modal lembaga pemerintah yang mengurus pendidikan dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. Total biaya overhead per tahun di bagi jumlah siswa di masing-masing tingkat baik kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. Sehingga diperoleh biaya overhead pemerintah per siswa per tahun di masing-masing tingkatan.

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilaksanakan, telah ada beberapa penelitian sejenis tetapi berbeda dalam sudut pandang dan kajiannya, berikut penelitian terdahulu yang dapat di dokumentasikan.

1. Kisbiyanto, (2014) ,dalam penelitiannya yang berjudul Pengefektifan

Manajemen Pembiayaan Pendidikan.⁶⁷ Pembiayaan pendidikan sangat penting untuk perencanaan pendidikan dan para pembuat kebijakan pendidikan. Ketersediaan biaya yang memadai dengan manajemen pembiayaan (manajemen of finance) yang lebih baik dapat menyumbangkan peningkatan hasil pendidikan, baik dilihat dari jumlah maupun mutunya. Pembiayaan pendidikan sebagai salah satu faktor penting penyelenggaraan pendidikan memerlukan analisis yang cermat

⁶⁷ Kisbiyanto, *Pengefektifan Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, Elementary, Vol 2 No 1, 2014 hlm .160.

dan tepat sehingga pengelolaan pendidikan bisa dilaksanakan secara efisien dan efektif. Efisiensi anggaran terletak pada ketepatan analisis dan penggunaannya semaksimal mungkin bagi kepentingan pendidikan. Efektifitas anggaran terletak pada besarnya capaian tujuan pendidikan yang didukung oleh penggunaan anggaran pendidikan.

2. M . Jupri, (2012), dalam penelitiannya yang berjudul model Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju SBI.⁶⁸ Rintisan sekolah bertaraf internasional banyak diminati masyarakat, tetapi untuk mendapatkan pendidikan tersebut diperlukan biaya yang tinggi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus, penelitian ini untuk menganalisis pembiayaan SMP N 2 RSBI Rembang dengan fokus, penganggaran, akuntansi, dan auditing, hasil penelitian menunjukkan bahwa SMP N 2 RSBI Rembang, dalam proses pembiayaan pendidikan melibatkan banyak pihak, pencatatan penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan telah sesuai dengan data. Pengawasan dan pertanggungjawaban dilaksanakan melalui audit internal dan eksternal sekolah. Disarankan sekolah dapat melibatkan pengurus osis dalam tim sekolah untuk mendapatkan usulan yang berkenaan dengan kebutuhan siswa dalam anggaran sekolah. Sekolah memiliki ahli IT untuk membantu mengelola sistem informasi dan keuangan sekolah, pemerintah kabupaten dapat membuat standar iuran masyarakat untuk RSBI/SBI agar pembiayaan bisa transparan. Dalam alternatif model manajemen pembiayaan pendidikan ,tim penyusun anggaran sekolah di bentuk sebelum tahun pelajaran berjalan. Rancangan anggaran dikonsultasikan ke dinas pendidikan kab Rembang, selanjutnya dimintakan persetujuan komite sekolah sebagai perwakilan orangtua dinas pendidikan dan pengesahan dari dinas pendidikan agar RAPBS menjadi APBS.

⁶⁸ Jupri, M, *Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Menuju SBI Di SMP N 2 Rembang*, Journal of Economic Education, Unnes, Vol, 1, 2012, hlm.21.

3. Armida, (2011), dalam penelitiannya yang berjudul Model Pembiayaan Pendidikan di Indonesia.⁶⁹ Pembiayaan dalam dunia pendidikan bukanlah hal yang sederhana. Di negara maju, pembiayaan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab negara. Dalam sejarah Indonesia, setidaknya ada dua model pembiayaan pendidikan. Model pertama adalah sentralisasi, yang dilaksanakan pada masa ord baru, dan model desentralisasi yang dilaksanakan pada masa orde reformasi. Dalam hal pembiayaan , ada tiga komponen yang bertanggungjawab, pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Kesimpulannya adalah dalam mengelola suatu pembiayaan pendidikan diperlukan suatu konsep dan sistem perencanaan yang matang, agar mampu merumuskan sistem pembiayaan nasional pendidikan Indonesia dalam kerangka otonomi daerah
4. Nanang Fattah, (2008), dalam penelitiannya yang berjudul Pembiayaan Pendidikan Landasan Teori dan Studi Empiris .⁷⁰ Pembiayaan dihampir semua negara disediakan baik oleh oleh sektor swasta maupun pemerintah. Terdapat beragam komponen dalam pembiayaan pendidikan, umumnya dihitung dari biaya nyata dan biaya operasional. Penghitungan biaya pendidikan meliputi total cost per siswa, average cost, dan marginal cost. Kesimpulannya adalah bahwa pendidikan lebih menguntungkan sebagai bentuk investasi untuk individu, dari pada untuk masyarakat secara keseluruhan.
5. Buhari Luneto, (2015),dalam penelitiannya yang berjudul Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Madrasah.⁷¹ Biaya adalah semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan baik dalam bentuk uang atau barang dan tenaga. Masalah dalam pembiayaan pendidikan adalah bagaimana biaya yang diperoleh itu direncanakan, dan dialokasikan. Biaya yang dikeluarkan dalam pendidikan meliputi biaya

⁶⁹Armida, *Model Pembiayaan Pendidikan di Indonesia*, Jurnal Media Akademika,Fakultas Adab IAIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Vol.26, No.1, tahun, 2011.

⁷⁰ Fattah, Nanang, *Pembiayaan Pendidikan Landasan Teori dan Studi Empiris*, Jurnal Pendidikan Dasar, UPI, No. 9, tahun, 2008.

⁷¹ Luneto, Buhari, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan, di Madrasah*, Jurnal Tadbir, IAIN Sultan Amai Gorontalo, Vol 3 No. 2 ,tahun .2015.

langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar mengajar, sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang yang dikorbankan siswa selama belajar. Kesimpulannya adalah bahwa hal terpenting pada penyusunan RAPBS/M adalah bagaimana memanfaatkan dana secara efisien serta mengalokasikan dana secara tepat sesuai kebutuhan agar keberhasilan program dapat di capai.

Berdasarkan kajian Dari kelima hasil penelitian tersebut dapat disarikan bahwa kelimanya lebih menekankan pada tataran keefektifan pembiayaan, pengawasan, akuntansi, pertanggungjawaban perumusan sistem pembiayaan dan kebermanfaatan manajemen pembiayaan, sehingga penulis perlu memaksimalkan fungsi manajemen yang lain dalam pembiayaan pendidikan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan penelitian baru yang berjudul manajemen pembiayaan pendidikan (studi kasus di MTs Maslakul Huda Sluke) yang sifatnya akan melengkapi penelitian sebelumnya dan pembaharuan.

I. Kerangka Berfikir

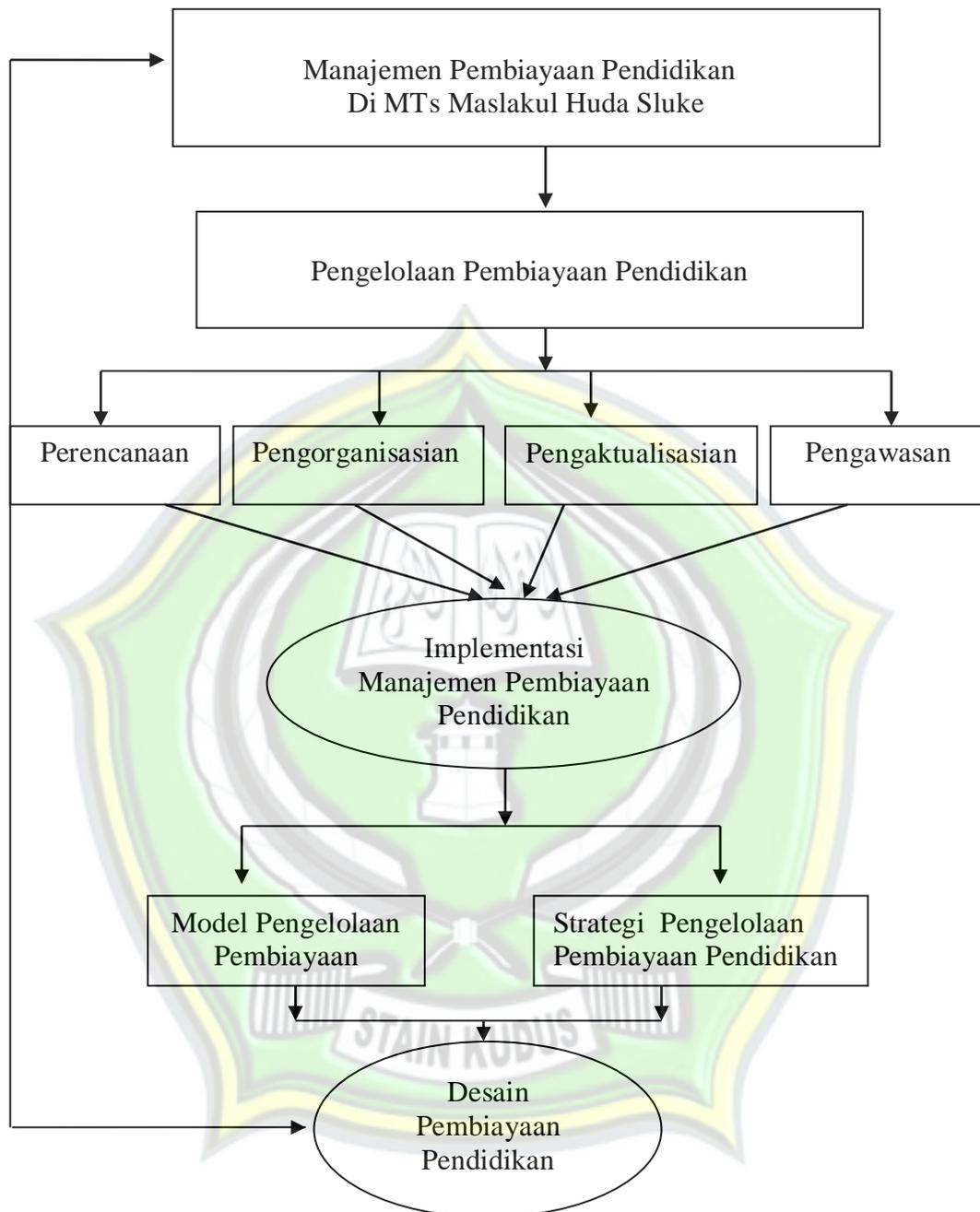
Kerangka berfikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berfikir disusun berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka berfikir merupakan suatu argumentasi dalam merumuskan hipotesis, argumentasi kerangka berfikir menggunakan logika berfikir induktif. Kerangka berfikir yang akan dihasilkan dapat berupa kerangka berfikir yang asosiatif maupun komparatif. Kerangka model ini dapat di gambarkan dengan kalimat jika begini maka begitu.⁷² Selanjutnya untuk menengarahi, bahwa kerangka berfikir dalam penelitian ini baik, maka variabel-variabel yang diteliti harus dijelaskan, Diskusi dalam kerangka berfikir harus dapat

⁷²Husaini, Usman dan Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2008. hlm 76

menunjukkan dan menjelaskan hubungan antar variabel yang diteliti, dan teori yang mendasari. Penyusunan kerangka berfikir dengan menggunakan argumentasi-argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan ini akhirnya melahirkan suatu kesimpulan. Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat di narasikan sebagai berikut :

Keunikan MTs Maslakul Huda Sluke, dengan budged/anggaran pembiayaan minimal dapat mengantarkan siswa dalam meraih prestasi, yang patut dibanggakan yaitu dalam waktu 3 tahun siswa mampu menghafal al Qur`an minimal sebanyak 3 Juz pada kelas excellen, dan Juz a`mma pada kelas reguler. Maka untuk keberlangsungan program tersebut diperlukan manajemen yang handal sesuai kondisi madrasah yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pembiayaan pendidikan yang mengedepankan prinsip-prinsip manajemen modern tanpa meninggalkan kultur madrasah yang berlandaskan Ahlussunnah wal jamaah, agar pelaksanaan sejumlah program madrasah berjalan efektif dan efisien. Pelaksanaan manajemen pembiayaan di MTs Maslakul Huda Sluke dilakukan dengan memaksimalkan fungsi-fungsi manajemen, cara penghitungan pembiayaan, model ,teori, dan pendekatan pembiayaan yang diimplementasikan dalam praktek pengelolaan madrasah dengan menggunakan model dan strategi pengelolaan pembiayaan yang tepat akan dihasilkan desain pembiayaan pendidikan yang mendorong lahirnya generasi khoirul ummat(output/lulusan yang cakap , berprestasi, berdaya saing tinggi, dan meningkatkan mutu pendidikan di MTs Maslakul Huda Sluke) yang mengakomodasi seluruh kepentingan baik siswa maupun seluruh stakeholder lembaga, yang diharapkan kelak peserta didik yang dihasilkan dapat menjadi generasi khoirul ummat.

Secara jelas kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat di gambarkan pada bagan di bawah ini:



Gambar 3. Kerangka Berfikir